

Laporan Kinerja 2023

DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNG MAS



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah**

Jalan Diponegoro III No.1 Kuala Kurun 74511 e-mail : transnakerkopukm1@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara utuh selama perjalanan Tahun 2023, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun mendatang.

Kepala Dinas, 18 Maret 2024

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Gunung Mas,



SUDIN, S.E

Pembina Utama Muda

NIP.196409061998031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii-iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum.....	2
1. Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
2. Sumber Daya Aparatur	4
C. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Visi dan Misi	7
C. Tujuan dan Sasaran	8
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
E. Perjanjian Kinerja	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV : PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023
Tabel 1.2	Komposisi Berdasarkan Jabatan
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dengan Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Program
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023
Tabel 3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023
Tabel 3.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023
Tabel 3.13	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023
Tabel 3.14	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023
Tabel 3.17	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024
Tabel 3.18	Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023
Tabel 3.19	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023
Tabel 3.20	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024
Tabel 3.24	Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023
Tabel 3.25	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023

- Tabel 3.26 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
- Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program
- Tabel 3.28 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022
- Tabel 3.29 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024
- Tabel 3.30 Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023
- Tabel 3.31 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023
- Tabel 3.32 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
- Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2023
- Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan per sasaran Tahun Anggaran 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mewajibkan, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga mengacu pada dokumen Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator- indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tahun 2019-2024. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dengan harapan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas;
2. Mendorong Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Gambaran Umum

1. Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta desentralisasi maupun dekonsentrasi di Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain itu di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas juga menyelenggarakan fungsi sebagai :

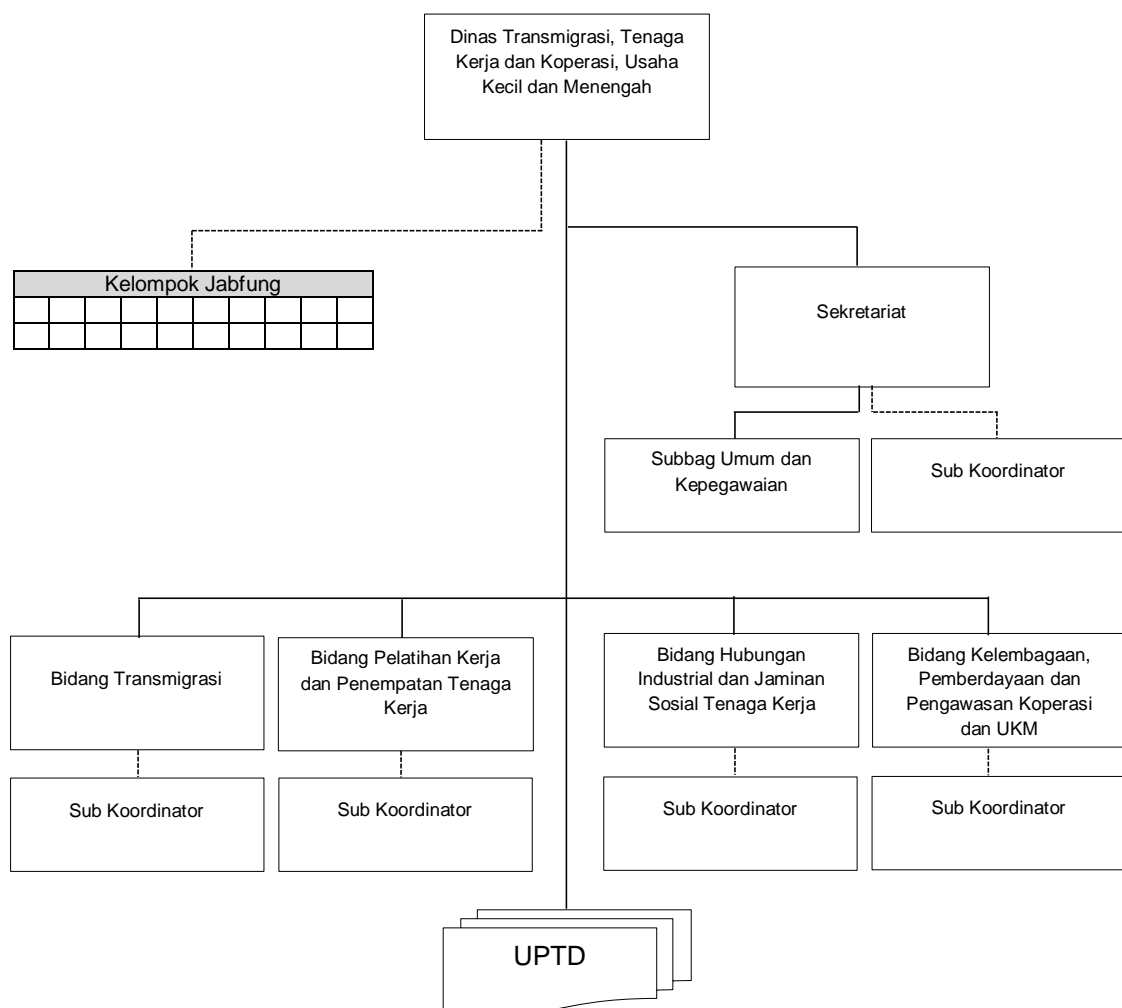
- a. Perumus kebijakan teknis transmigrasi, tenaga kerja, dan koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang transmigrasi, tenaga kerja, dan koperasi usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan fasilitas Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi, tenaga kerja, dan koperasi usaha kecil dan menengah, di bidang yaitu Bidang Transmigrasi, Bidang

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- f. Perumusan tentang transmigrasi, pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja pelaksanaan kebijaksanaan, pemberdayaan koperasi usaha kecil dan menengah serta pengembangan pemberian ijin USP dan KSP.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023



2. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, didukung oleh Sumber Daya Aparatur dengan komposisi yaitu:

Tabel 1.2
Komposisi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	-	1	1
4	Sub Koordinator/Fungsional	3	7	10
5	Pelaksana	12	5	17
6	PPPK	-	1	1
7	PTT	11	6	17
Jumlah		30	22	52

Sumber: data Kepegawaian Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas 2023

C. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan sistematika berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Strategis bertujuan untuk:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
- c. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- d. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2019-2024;
- e. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
- f. Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Visi dan Misi

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri (Berjuang Bersama)”,

Berangkat dari visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas mendukung pencapaian Misi ke-3 Pemerintah Daerah untuk **“Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah”**.

Tabel 2.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dengan Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas

Visi : “TERMUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
			2. Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	2. Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani
			3. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kemampuan Manajemen Kelembagaan Koperasi	3. Koperasi Aktif
			4. Meningkatnya Produktivitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4. Jumlah UMKM
			5. Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	5. Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”.

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi, indikator sasaran adalah a). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan b). Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, indikator sasaran adalah Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani;
3. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kemampuan Manajemen Kelembagaan Koperasi, indikator sasaran adalah Koperasi Aktif;
4. Meningkatnya Produktivitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, indikator sasaran adalah Jumlah UMKM; dan
5. Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, indikator sasaran adalah Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024									
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	90	90	90	90	90	
		1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03	
	2. Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	2. Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	perkara	5	4	2	2	2	
	3. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kemampuan Manajemen Kelembagaan Koperasi	3.1 Koperasi Aktif	%	65	69	73	77	80	
	4. Meningkatnya Produktivitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4. Jumlah UMKM	unit	2.985	2.999	3.013	3.027	3.050	
	4 Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	5. Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di	%	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	

		kawasan transmigrasi						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula/Cara Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$\frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program
1	Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS
2	Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
3	Meningkatnya Kualitas SDM dan Kemampuan Manajemen Kelembagaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro
4	Meningkatnya Produktivitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM
5	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya
6	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan

E. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 maka Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Pada tahun 2022, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memperjanjikan 5 Sasaran dan 6 target Indikator Kinerja Program dengan Kepala Daerah, yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
1	Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	90%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,05%
2	Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	2 perkara
3	Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	Koperasi Aktif	77%
4	Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah UMKM	3.027 unit usaha
5	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	93,22%
6	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 115.000.000,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 280.000.130,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 119.708.398,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 207.574.264,-	APBD
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 164.198.874,-	APBD
6.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp. 318.370.000,-	APBN
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 371.154.800,-	APBD
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.547.618.684,-	APBD
9.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 259.854.264,-	APBD
10.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 182.574.264,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja. Tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat, di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua melaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	56% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

Capaian indikator dan target Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 berdasarkan indikator program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	1.1	Tingkat pengangguran terbuka	1,05%	3,24%	308	Sangat Tinggi
		1.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	90%	71,06%	78,95	Tinggi
2	Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	2	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	2	2	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	3	Jumlah koperasi aktif	77%	89%	115,58	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	4	Jumlah UMKM	3.027	3.663	121,01	Sangat Tinggi
5	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	5	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	93,22%	75%	80,45	Tinggi
6	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6	Nilai SAKIP	B	BB	100	Sangat Tinggi

Sesuai Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, visi dan misi mengacu pada visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran strategis

meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2024 pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gunung Mas sebesar 23,24 persen atau naik sebesar 0,28 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai misi Bupati diatas serta tujuan dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi

Sasaran strategis ini merupakan salah satu komponen upaya mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan tenaga kerja siap pakai melalui pelatihan kerja dan pemagangan. Upaya ini dilakukan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga mampu berkompetisi di pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Tingkat pengangguran terbuka	1,05	3,24	308
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	90	71,06	78,95

Sasaran Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi diatas mempunyai 2 indikator yaitu 1). Tingkat pengangguran terbuka dengan target 1,05% dan realisasi 3,24% dengan tingkat capaian 308%, 2). Tingkat partisipasi angkatan kerja dengan target 90% dan realisasi 71,06% dengan tingkat capaian 78,95%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Tingkat pengangguran terbuka	1,11	1,09	3,11	1,07	2,96	1,05	3,24
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	90	90	69,70	90	69,50	90	71,06

Untuk realisasi tahun 2023 dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka yaitu 3,24%. Untuk realisasi kondisi awal 2020 sebesar 1,11%, realisasi tahun 2021 naik sebesar 3,11%. Dimana masa tersebut masih terjadinya pandemi covid-19 yang melanda. Di tahun 2022 realisasi sempat turun di angka 2,96% dan tetapi malah ada kenaikan di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 3,24%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Tingkat pengangguran terbuka	3,24	1,03	31,79
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,06	90	126,65

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 implementasi Renstra. Indikator capaian kinerja yang pertama adalah tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,24%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 sebesar 1,03%, maka presentase capaian 31,79%. Sedangkan capaian kinerja indikator kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja telah terealisasi sebesar 71,06% di tahun 2023 yang berarti capaian akhir Renstra sebesar 90% atau memiliki persentase ketercapaian sebesar 126,65%.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Tingkat pengangguran terbuka	3,24	1,03	31,79	Masih rendahnya minat pencaker yang terdaftar	
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,06	90	126,65	Pelatihan lebih diprioritaskan pasca pandemi covid-19	

Tabel diatas menunjukan bahwa sasaran strategis tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi mempunyai 2 indikator sasaran yaitu pertama tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat capaian 31,79% dan kedua tingkat partisipasi angkatan kerja dengan tingkat capaian 126,65%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategi terhadap tingginya angka tingkat pengangguran terbuka akibat rendahnya minat pencaker, dan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu dengan adanya program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi				514.708.528	507.068.639	98,51
a . Tingkat pengangguran terbuka	3,24	1,03	31,79			
b . Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,06	90	126,65			

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi pada tahun 2023, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori 'baik'. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 1,49%.

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran tersebut dengan hasil tingkat capaian lebih dari 90% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut

beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 7 orang yang berasal dari bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\geq 90\%$.

Tabel 3.8
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Tingkat pengangguran terbuka	3,24				Menunjang
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	97,37	Menunjang
			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	100%	Menunjang
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	97,97	Menunjang
			Kegiatan Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Meningkatkan pendapatan asli daerah	100%	Menunjang
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,06				Menunjang
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	99,22	Menunjang
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan SDM	100%	Menunjang

Sasaran 2 :**Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan mewujudkan suasana hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dengan tenaga kerja Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	2	2	100%

Sasaran Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial dapat dilihat tabel diatas, yaitu indikatornya jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani yaitu 2 perkara dengan realisasi hanya 2 perkara saja dengan tingkat realisasi kinerjanya mencapai 100%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	5	4	4	2	2	2	2

Tabel diatas merupakan penjabaran capaian sasaran strategis ke-2, yakni Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial dengan indikator adalah Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani, dimana realisasi pada kondisi awal tahun 2020 sebanyak 5 perkara dan tahun 2021 sebanyak 4 perkara yang ditangani. Untuk tahun 2022 realisasinya 2 perkara dan tahun 2023 juga 2 perkara ditangani.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	2	2	100

Dapat dilihat pada tabel diatas, dimana realisasi Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani sebanyak 2 perkara dan target di tahun 2024 juga sebanyak 2 perkara yang diselesaikan. Capaian kinerja berdasarkan target akhir 2024 sebesar 100%.

4 . Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	2	2	100	Antisipasi dengan pencegahan terhadap sengketa antara perusahaan dan pekerja	Sosialisasi ke perusahaan dan pekerja tentang peraturan dan UU tenaga kerja

Sasaran Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial sebagai langkah upaya pelaksanaan data dan sarana hubungan industrial yaitu dari target 2 perkara dan terealisasi sebesar 2 perkara juga. Komponen kinerjanya meliputi :

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial				207.574.264	206.037.993	99,26
- Pelaksanaan data dan sarana hubungan industrial	2 perkara	2 perkara	100			

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran kinerja Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial pada tahun 2023, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori 'baik'. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,74%.

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial dengan hasil tingkat capaian lebih dari 90% berarti dilaksanakan secara efektif dan beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini sudah cukup dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 7 orang pada bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil indikator realisasi sasaran kinerja Terbinanya kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\geq 90\%$.

Tabel 3.14
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
Terbinanya kelembagaan dan	Pelaksanaan data dan sarana hubungan	100				Menunjang

pemasyarakatan hubungan industrial	industrial		Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan data dan sarana hubungan industrial	97,63	Menunjang
			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Tersedianya data ketenagakerjaan	100	Menunjang
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	100	Menunjang

Sasaran 3 :

Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi

Sasaran strategis ini merupakan salah tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan Peningkatan kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi yang sehat dan aktif. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif	77	89	115,58

Sasaran Meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi dengan indikator jumlah koperasi aktif dengan target 77% dengan realisasi 89% dengan tingkat capaian 115,58% dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif	65	69	90	73	88	77	89

Untuk realisasi tahun 2023 dengan indikator kinerja jumlah koperasi aktif yaitu 89%. Penilaian berdasarkan dari KSP/USP koperasi yang mempunyai dana bergulir. Untuk realisasi kondisi awal 2020 sebanyak 69%, tahun 2021 sebesar 90% dan tahun 2022 sebesar 88%. Dari segi realisasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ada penurunan, tapi dari segi perbandingan dari segi target masih tergolong naik.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif	89	80	89,89

Dapat dilihat pada tabel diatas, dimana realisasi pelaksanaan jumlah koperasi aktif hanya sebanyak 89% dan target di tahun 2024 sebanyak 80% diselesaikan. Jadi capaian kinerja berdasarkan target akhir 2024 hanya sebesar 89,89%.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.18
Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif	77	89	115,58	Koprasinya aktif melaksanakan RAT dan	

Dari sasaran Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi diatas, dimana hasil evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi hanya teralisasi sebanyak 29 unit usaha. Ini tidak lepas dari koperasi yang aktif melaporkan dan melaksanakan RAT setiap tahunnya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.19
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi				164.198.874	162.924.264	99,22
- Jumlah koperasi aktif	77	89	115,58			

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran kinerja Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi pada tahun 2023 dengan indikator jumlah koperasi aktif menyisakan efisiensi anggaran sebesar 0,78% saja.

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi dengan hasil tingkat capaian 115,58% berarti dilaksanakan secara efektif dan dengan beban kerja yang menunjang kinerja sasaran dengan jumlah pegawai yang hanya sebanyak 8 orang pada bidang Kelembagaan, Pemberdayaaan, Pengawasan Koperasi dan UKM yang hanya terdiri 6 orang PNS, 1 PPPK dan 1 orang tenaga kontrak/PTT.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil indikator realisasi sasaran kinerja Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari

(menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.20
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
Meningkatnya kualitas SDM dan kemampuan manajemen kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif	115,58				Menunjang
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	99,22	Menunjang
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang mempunyai dana bergulir	29	Menunjang
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro	95	Menunjang
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kompetensi SDM koperasi	100	Menunjang

Sasaran 4 :

Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah UMKM	3.027	3.663	121,01

Dengan sasaran meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator jumlah UMKM dengan target 3.027 UMKM dengan realisasi 3.663 pelaku UMKM juga dengan tingkat capaian 121,01% dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.22
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah UMKM	2.985	2.999	3.059	3.013	3.227	3.027	3.663

Realisasi tahun 2023 dengan indikator kinerja jumlah UMKM sebanyak 3.663 pelaku UMKM. Penilaian berdasarkan ini dari pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Realisasi dengan kondisi awal 2020 sebanyak 2.985 UMKM, tahun 2021 sebanyak 3.059 UMKM dan tahun 2022 sebanyak 3.227 UMKM.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.23
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah UMKM	3.663	3.050	83,26

Dapat dilihat pada tabel diatas, dimana realisasi jumlah UMKM sebanyak 3.663 UMKM dan target di tahun 2024 sebanyak 3.050 UMKM. Jadi capaian kinerja berdasarkan target akhir 2024 akan sebesar 83,26% saja.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.24
Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah UMKM	3.027	3.663	121,01	Banyaknya pelaku usaha/UMKM yang muncul pasca pandemic covid-19	

Dari sasaran Meningkatkan produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah diatas, dimana hasil evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis terhadap jumlah UMKM teralisasi sebanyak 3.663 UMKM di tahun 2023.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.25
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah				371.154.800	370.158.615	99,73
- Jumlah UMKM	3.027	3.663	121,01			

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan sasaran kinerja Meningkatkan produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun 2023, efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori 'baik'. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,27%.

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran Meningkatkan produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dengan hasil tingkat tidak mencapai 99,73% berarti dilaksanakan secara efektif dan menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 8 orang pada bidang Kelembagaan, Pemberdayaaan, Pengawasan Koperasi dan UKM yang hanya terdiri 6 orang PNS, 1 tenaga PPPK dan 1 orang tenaga kontrak/PTT.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil dari indikator realisasi sasaran dapat disimpulkan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah UMKM	121,01				Menunjang
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	100	Menunjang
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang terdata	100	Menunjang
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro	95	Menunjang
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha	100	Menunjang

Sasaran 5 :

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi

Sasaran strategis yang kelima selanjutnya yaitu Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Pengukuran tingkat sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.27
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	93,22%	75%	80,45

Indikator ini adalah Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi dengan target 93,22% tingkat capaian 80,45% dengan kategori Tinggi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.28
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	93,22	93,22	75	93,22	75	93,22	75

Untuk realisasi tahun 2023 dengan indikator Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi yaitu 75%. Sedangkan untuk realisasi kondisi awal tahun 2020 sebesar 93,22%, tahun 2021 dan tahun 2022 sama sebesar 75%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.29
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2024

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	75	93,22	124,29

Indikator capaian kinerjanya adalah Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sebanyak 75%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 93,22%, maka presentase capaian 124,28% masih masuk dalam status optimis bisa tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.30
Analisis Keberhasilan/Kegagalan kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
---------	-------------------	--------	-----------	-------------	---------------------------------	-----------------------

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	93,22%	75%	80,45		
--	---	--------	-----	-------	--	--

Tabel diatas menunjukan bahwa indikator sasaran yaitu Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi dengan tingkat capaian 80,45%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis terhadap kegiatan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan indikator sebagai tolak ukur bagi potensi kawasan transmigrasi di tahun 2023 adalah 1 kegiatan dan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian dengan indikator penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman dengan 1 kegiatan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.31
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi				442.428.528	440.125.126	99,47
- Teridentifikasinya potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	93,22%	75%	80,45			

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi pada tahun 2023, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori 'baik'. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,53%.

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi dengan hasil tingkat capaian hampir mencapai 100% berarti dilaksanakan secara efektif karena ditunjang oleh beban kerja dengan tingkat jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 8 orang yang berasal dari bidang transmigrasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\geq 90\%$ atau hampir mencapai 100%.

Tabel 3.32
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	Teridentifikasinya potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	80,45				Menunjang
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	86	Menunjang
			Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	100	Menunjang
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	86	Menunjang
			Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	100	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar **Rp.7.566.053.678** (anggaran perubahan) realisasi anggaran atau serapan mencapai Rp.7.315.465.377,- (96,69%) yang terdiri dari Rp.7.247.683.678 berasal dari sumber anggaran APBD dan Rp.318.370.000 dari APBN.

Tabel 3.33
Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2023

No.	Program	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	APBD	-	115.000.000
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD	285.000.130	285.000.130
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD	113.629.436	119.708.398
4	Program Hubungan Industrial	APBD	169.724.783	207.574.264
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	APBD	131.159.393	164.198.874
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	APBN	318.370.000	318.370.000
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	APBD	201.149.593	371.154.800
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	APBD	5.172.181.410	5.547.618.684
9	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	APBD	181.814.783	259.854.264
10	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	APBD	179.724.783	182.574.264
Jumlah			6.752.754.311	7.566.053.678

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmud (2007) mengatakan bahwa efisien adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$EFISIEN = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

- 1) Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien;
- 2) Jika hasilpencapaian antara dari 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien;

- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif;
- 4) Jika hasil pencapaian antara dari 60% - 80%, maka anggaran dikatakan efisien;
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, amak anggaran dikatakan sangat efisien.

Tabel 3.34

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas setelah P-APBD per Program Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	115.000.000	111.974.548	97,37	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	115.000.000	111.974.548	97,37	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	115.000.000	111.974.548	97,37	kurang efisien
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	280.000.130	277.818.654	99,22	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	280.000.130	277.818.654	99,22	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	280.000.130	277.818.654	99,22	kurang efisien
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	119.708.398	117.275.437	97,97	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.708.398	117.275.437	97,97	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.708.398	117.275.437	97,97	kurang efisien
4	Program Hubungan Industrial	128.081.200	127.540.029	99,26	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.081.200	127.540.029	99,58	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	128.081.200	127.540.029	99,58	kurang efisien
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	79.493.064	78.497.964	98,75	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.566.064	66.592.864	98,56	kurang efisien

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.927.000	11.905.100	99,82	kurang efisien
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	164.198.874	162.924.264	99,22	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.198.874	162.924.264	99,22	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116.783.400	116.773.900	99,99	kurang efisien
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.415.474	46150364	97,33	kurang efisien
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	131.159.393	318.370.000	100	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.800.000	238.800.000	100	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	238.800.000	238.800.000	100	kurang efisien
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.570.000	79.570.000	100	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	79.570.000	79.570.000	100	kurang efisien
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	371.154.800	370.158.615	99,73	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	371.154.800	370.158.615	99,73	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	371.154.800	370.158.615	99,73	kurang efisien
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.536.382	10.278.000	97,95	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	3205642	3047800	95,08	kurang efisien

	SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3090020	2993600	96,88	kurang efisien
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2122120	2121000	99,95	kurang efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2118600	2115600	99,86	kurang efisien
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.679.807.748	3.487.391.479	94,77	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.672.810	3.380.132.587	94,69	kurang efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.525.944	67.673.728	97,34	kurang efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.915.130	2.882.100	98,87	kurang efisien
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	37.693.864	36.703.064	97,37	kurang efisien
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.540.000	112.381.367	99,86	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112.540.000	112.381.367	99,86	kurang efisien
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.952.677	717.794.428	99,84	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.032.738	6.993074	99,44	kurang efisien
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.468.500	31.377900	99,71	kurang efisien
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.258.730	10.910000	96,90	kurang efisien
	Penyediaan Bahan/Material	87.810.089	87.423500	99,56	kurang efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	581.382.620	581.089.954	99,95	kurang efisien
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.658.000	8.455.856	97,67	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.658.000	8.455.856	97,67	kurang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.016.865	802.652.784	95,33	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.390.000	2.290.000	95,82	kurang efisien
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.074.412	63.523.192	66,12	efisien
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.552.453	736.839.592	99,10	kurang efisien
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.724.377	168.568.526	98,16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.526.405	40626300	97,83	kurang efisien
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.363.472	62315226	96,82	kurang efisien

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.492.500	19285000	98,94	kurang efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.342.000	46342000	100	kurang efisien
	Penataan Organisasi	3.382.635	3.258.300	99,55	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.382.635	3.258.300	99,55	kurang efisien
9	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	259.854.264	258.678.937	99,55	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	259.854.264	258.678.937	99,55	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	50.000.300	49.897.600	99,79	kurang efisien
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	209.853.964	208.781.337	99,49	kurang efisien
10	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	182.574.264	181.446.189	99,38	
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	182.574.264	181.446.189	99,38	
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	182.574.264	181.446.189	99,38	kurang efisien
Jumlah		7.566.053.678	7.315.465.377	96,69	

BAB IV PENUTUP

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Kinerja ini merupakan serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama satu tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan *Output* dan *Outcome* pada umumnya sudah dicapai.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. **7.566.053.678** realisasi anggaran mencapai Rp. 7.315.465.377 atau 96,69%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar Rp.250.588.301 atau 3,31%, hal ini merupakan upaya penghematan dari sisa selisih harga perkiraan dari beberapa kegiatan utama penunjang maupun teknis kegiatan utama.

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2023 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat mencapai visi dan misi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas pada khususnya dan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas pada umumnya.